

# **Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu**

Oleh:

**SONDANG FRINANDO T**

**([sondangfrinando@gmail.com](mailto:sondangfrinando@gmail.com))**

**Pembimbing: Dr. Harapan Tua R.F.S. M.Si)**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

Sub-district role as Development Coordinator in Kabun is not entirely without problems. This research found that there are problems occur such as the lack of coordination on doing development in Kabun Sub-district whether it is physical or non-physical. The problem formulation on this research is How is the role of Sub-district head as development coordinator in Kabun Sub-district Rokan Hulu Regency, and What factor that support and hamper the development the role of sub-district head as development coordinator in Kabun sub-district Rokan Hulu Regency.

The purpose of this research is to understand the role of Sub-district head as development coordinator in Kabun Sub-district Rokan Hulu Regency and to understand the factors that support and hamper the role of Sub-district head as development Coordinator in Kabun Sub-district Rokan Hulu regency. This research is based on Kooznt theory about Koordination with planning elements, Communication, Division of Work and also Meeting/Conference. This research method is using descriptive qualitative approach. Informants on this research are the sub-district apparatus and people living in Kabun Sub-district. Data collection technique on this research are interview, observation, documentation, and qualitative analization.

The results of this research are the role of Sub-district head as development coordinator in Kabun sub-district Rokan Hulu Regency is going well, as proven by sub-district head has done the development planning in kabun Sub-district according to procedure on planning process by conducting development planning conference. Other elements like communication on development coordination has been properly implemented and officials work according to their task and responsibility, also meetings about problem solving went according to sub-district's agenda. The supporting dan hampering factors of sub-district head's role as development coordinator are: Development of facilities and infrastructure to conduct coordination are insufficient. Limitation of human resource and budget insufficiency also become factors that hamper the role of sub-district head's role as development coordinator.

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan Daerah. Di samping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong perubahan, salah satunya yang esensial adalah perubahan yang menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam asas dekonsentrasi. Penyerahan suatu tugas kepada suatu organisasi atau pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayan publik. Pelayanan ini menjadi penting, karena menyangkut kepentingan publik atau orang banyak, bahkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia

dibawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas Desa-desa atau Kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kecamatan adalah salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan beberapa diantaranya meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaran pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Melaksanakan fungsi dan peran sebagai Koordinator dalam pembangunan sebagaimana diperankan oleh pemerintah memang tidak mudah. Apalagi dalam unsure pemerintahan tersebut yang bergerak sebagai pelaku pembangunan terbagi dalam berbagai institusi, badan, lembaga, atau departemen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komponen swasta dan masyarakat juga terbagi dalam berbagai fungsi dan peran, seperti kalangan industri, kalangan perbankan, jasa dan pelayanan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat ada golongan buruh, petani, pegawai, dan lain-lain. Hal ini semakin pentingnya koordinasi sebagai alat untuk menyatupadukan fungsi dan peran yang berbeda, agar terjalin hubungan kerja sama yang baik, efektif, dan efisien sehingga tujuan bersama dapat tercapai (Riyadi dan Bratakusumah, 2003:311).

Dalam hal ini Camat sebagai koordinator dan Pemimpin di Kecamatan Kabun sangat berperan penting dalam mengkoordinasikan setiap pembangunan yang ada di wilayahnya untuk menyelaraskan setiap kebutuhan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya yang di atur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 39 Tahun 2011.

Begitu juga peran serta Camat yang begitu luas dan kompleks tapi kurang informasi yang diketahui peranan Camat selama ini, di Kecamatan Kabun belum ada yang melakukan penelitian tentang peran Camat sebagai coordinator pembangunan dalam membangun daerahnya terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, dalam upaya penyelenggaraan ketemtraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ada di wilaya Kecamatan Kabun. Dan berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik meneliti peran dari Camat dengan judul: Peran Camat Sebagai Koodinator Pembangunan di

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Peran

Setiap jabatan dalam struktur kelompok memiliki peran yang menentukan perilaku yang diharapkan dari sipemegang jabatan (**Organ dalam Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2006:11**). Pekerjaannya menuntut dia untuk memainkan sejumlah peran: yaitu, untuk menunjukkan serangkaian pola perilaku yang diharapkan, sehubungan dengan posisi yang diberikan dalam suatu unit social (**Robbins, 2002:109**). Dalam hal ini Camat sebagai koordinator di wilayah Kecamatan diharapkan peranya untuk untuk mengkoordinasikan setiap persiapan dan pelaksanaan program yang ada di Kecamatan. Begitu juga dalam setiap aparatur kecamatan diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan dalam “Kamus Besar Bahasa Indoensia” menjelaskan peran adalah perangkat tingkah atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

**Gibson, dkk (1985:248)** menjelaskan peran dibagi dalam dua yaitu peran yang dipersepsikan (*perceived role*) ialah perangkat perilaku seseorang dalam suatu posisi ia berpendapat bahwa ia harus memainkan peran tersebut. Dalam beberapa hal, peranan yang dipersepsikan tersebut mungkin sama dengan peranan yang diharapkan. Sedangkan peranan yang dimainkan adalah perilaku yang benar-benar dilaksanakan seseorang.

Namun menurut **Djanalis Djanaid** dalam Ardana, dkk ( 2009:103) mengemukakan bahwa peran/fungsi pemimpin adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengambil keputusan.
- 2) Memotivasi anak buah.

- 3) Sebagai sumber informasi.
- 4) Menciptakan inspirasi.
- 5) Menciptakan keadilan.
- 6) Sebagai katalisator.
- 7) Sebagai wakil organisasi.
- 8) Menyelesaikan konflik.
- 9) Member sugesti pada anak buah.

## 2. Kepemimpinan

**Siagian** (2003:62) mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang yang menduduki jabatan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa melalui perilaku yang positif ia akan memberikan sumbangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi.

**Kartini Kartono** dalam Pasolong (2011:109) mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Kepemimpinan adalah kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Tanpa inspirasi pemimpin, organisasi atau sebuah departemen mungkin akan tidak fokus pada tujuan tertentu, misalnya untuk meningkatkan keamanan kerja.

Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin seorang diri, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin disamping itu harus memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi.

## 3. Koordinasi

Sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada bawahan oleh pemimpin maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu bawahan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Aktivitas suatu organisasi berbeda dalam hal sejauh mana aktivitas unit lainnya kebutuhan akan suatu koordinasi tergantung pada persyaratan bentuk dan komunikasi tugas-tugas yang dilakukan dan tingkat ketergantungan berbagai sub unit yang melaksanakan tugas tersebut, (**Joseph LC. Cheng** dalam Djatmiko, 2008:62). Sedangkan **Stoner** dalam Djatmiko (2008:62) mengatakan koordinasi adalah proses pemanduan tujuan kegiatan unit-unit yang terpisah departemen atau bidang-bidang fungsional dalam suatu perusahaan secara efisien.

Menurut **Manullang** (2008:12) *coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi interuksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.

Menurut **Handoko** (2003:196), kebutuhan akan organisasi tergantung pada sifat dan kebutuhan pada komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. **Handoko** juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan factor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi koordinasi sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Selanjutnya menurut **Koontz dan O'Donnel** dalam (Tinambunan, 2009: 19) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsure-unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dan berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya:

1. Adanya Perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
2. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara kelompok dalam bentuk kerja sama.
4. Adanya pengawasan terhadap unit-unit pelaksanaan tugas dan hubungan kerja.

**Hasibuan** (2006:88), menjelaskan syarat-syarat koordinasi yang baik sebagai berikut:

- a. *Sence of cooperation* (perasaan untuk kerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian bidang pekerjaan bukan orang perorangan.
- b. *Rivalry* dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan

antara bagian-bagian agar bagian ini berlomba untuk mencapai kemajuan.

- c. *Team spirit* artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. *Espirit de corps* artinya bagian-bagian yang diikuti sertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan bersemangat.

**Hasibuan** (2006:90), menjelaskan ada beberapa faktor yang berhubungan erat dan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, dalam artian jika factor-faktor yang berhubungan tersebut diterapkan dengan baik maka koordinasi akan lebih mudah tercapai, factor-faktor tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan dan pengendalian.

Pendekatan utama koordinasi adalah komunikasi, karena pelaksanaan ruang waktu yang memperlancar pencapaian tujuan koordinasi adalah hubungan antar individu atau instansi. **Syafii** (2006:61) mengartikan komunikasi sebagai suatu proses rangkaian penataan, berupa penyampaian berita atau informasi baik berupa suara, lambang atau kode warna dari suatu orang kepada orang lain untuk suatu tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian koordinasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu tindakan-tindakan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu di dalam koordinasi. Oleh karena itu suatu koordinasi penting untuk menciptakan kondisi kerja sama untuk menumbuhkan situasi yang kondusif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin kepada bawahannya sehingga tujuan dari tugas dapat terpenuhi dengan baik.

#### 4. Pembangunan

Jika kita mendengar pembangunan maka terlintas dalam pikiran kita adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada, dari yang berubah menjadi atau

berganti dengan yang baru. Pembangunan bangsa dewasa ini perlu diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna. pembangunan yang proses multidimensi mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolute.

Menurut **Siagian** (2003:147) konsep pembangunan di Indonesia bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. **Pratikto** (2002:119) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa dan Negara.

Pembangunan sebagai suatu proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas dan nasional dan legitimasi dan memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi mereka, berkelanjutan adil dan merata.

Ada beberapa ide pokok pembangunan:

1. Pembangunan merupakan proses yang berarti, pembangunannya itu berlangsung secara berkelanjutan.
2. Usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah kepada perbaikan dan peningkatan.
3. Bagian sentral dan integral dari usaha perubahan bangsa yang pada gilirannya akan mencapai tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut **Rogers** dalam Nasution (2004), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan

modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial (**Menurut Seers** dalam Naustion, 2004).

Masalah koordinasi erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan. (**Soewarno** dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2003:311) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi.

Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi dalam pembangunan, yaitu bahwa:

1. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda.
2. Aktivitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggung jawab secara fungsional yang berbeda pula.
3. Ada institusi, badan, lembaga, yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
4. Ada unsure sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses pembangunan yang melibatkan institusi pusat maupun daerah.
5. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan

dalam proses pembangunan, sehingga akan terjadi cipta suatu aktivitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama (**Riyadi dan Bratakusumah, 2003:312**).

Jika melihat Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dapat digunakan teori Koonzt sesuai dengan syarat-syarat Koordinasi yang baik.

## METODE

Sesuai dengan Judul penelitian mengenai Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, maka lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Kabun. Dimana penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Peran yang dilakukan Camat sebagai koordinator pembangunan. Adapun *Key informan* dalam penelitian ini adalah Camat, Kasi. PMD, Kasi. Pemerintahan, Kasubag. Umum dan Perencanaan serta masyarakat Kabun.

Di dalam metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang di temui dilapangan. Setelah hasil analisa diterik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan

#### a) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses penyusunan bagaimana menempuhnya atau proses indikasi kemana tujuan akan dituju serta bagaimana menempuh tujuan tersebut. Camat melakukan perencanaan pembangunan bersama dengan perangkat-perangkat Kecamatan. Hal ini didukung oleh wawancara peneliti:

“Dengan banyak cara, ada yang turun kemasyarakat, turun kedesa dan ada juga melalui rapat koordinasi dipanggil itu Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan BPD, termasuk juga Pemuda, namun untuk Pemuda itu dilapangan tapi kalau rapat koordinasi dengan Kepala Desa. Setelah itu kita turun kelapangan baik menengok objeknya langsung maupun melauai temu ramah atau juga melalui silaturahmi. Habis itu melalui jalur formal direncanakan yaitu melalui Musrembang. Kalau di tingkat Desa melakukan musyawarah Pak Kasi PMD saya suruh turun dan saya juga turun kesana, tapi karena waktu saya terbatas selebinya saya serahkan ke Kasi PMD.” (**Wawancara dengan Camat Kabun Kabupaten Rokan Hulu Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 Februari 2015**).

“Kalau merencanakan pembangunan di Kecamatan Kabun ini, ini dilingkungannya? Kalau di Merencanakan pembangunan di Kecamatan yang ikut merencankannya Camat bersama jajarannya, para UPIKA (Unsur Pimpinan Kecamatan), Kasi, Kasubag, Kepala UPTD, Kepala Desa. Kalau Tokoh Masyarakat yaitu Ninik Mamak, Ulama, Tokoh Adat. Dan lain-lainnya seperti masyarakat, Ormas, PMI. Jadi Perencanaan pembangunan itu awalnya Musrembang dari Desa, Musrembangdes namanya. Musrembangdes itu dihimpun seluruh aspirasi usulan seluruh dari RT, RW, Kadus dan lainnya itu nanti dikumpulkan di Kecamatan dan setelah itu Kecamatan membuat Musrembang Kecamatan. Jadi Musrembang ini kuncinya.” (**Wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Kabun, Bapak H. Maksu, S.Sos. 02 Februari 2015**).

“Merencanakan pembangunan dalam bentuk rapat dan dituangkan dalam seperti musrembang, musrembang ini ada tingkatannya yang pertama itu dari murembang desa, masing-masing desa menyaipakan usulannya setelah desa

mengadakan musrembang baru nanti di Kecamatan. Semua pembangunan entah apapun yang diminta oleh masyarakat tercantum disitu (Musrembang) dan di terima oleh Kasi PMD. Memang ujung tombaknya nanti semua kesini di tuangkan ( di Kecamatan). Setelah itu Camat berkoordinasi dengan pihak Kabupaten. Yang ikut dalam perencanaan UPIKA, Anggota Dewan, PKK, LKA. Kecamatan, Dinas Sosial, Polsek, UPTD, Kepala Desa, Dispora, KNPI, Dinas Tanam dan Pangan, Karang Taruna, Dinas Pertanian, Koperasi, Dinas Industri, Dukcapil, Disdik, PMI, Dinas Perdagangan, dan lain-lain.” **(Wawancara dengan Kasubag. Umum dan Perencanaan, Ibu Yurniaty, SP. 03 Februari 2015).**

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Camat melakukan atau merencanakan setiap pembangunan yang ada di Kecamatan Kabun berkoordinasi dalam bentuk Musyawarah Pembangunan (Musrembang) kepada setiap unsure-unsur yang terkait untuk dapat menentukan skala prioritas yang akan di bangun di Kecamatan Kabun. Perencanaan suatu pembangunan perlu melibatkan semua unsur agar tidak adanya simpang siur informasi.

#### b) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyesuaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Camat Kabun harus mengefektifkan komunikasi dengan perangkat Kecamatan dan juga kepada masyarakat agar terjalin koordinasi yang baik agar dapat mencapai target pembangunan yang telah ditentukan. Camat melakukan komunikasi dalam koordinasi untuk menegtahui masalah dan mentukan skala prioritas dalam pembangunan di Kecamatan Kabun.

“Kalau komunikasi dengan Instansi nanti forumnya melalui Musrembang Kecamatan nanti, atau koordinasinya melalui Via Telepon saja kan gitu, cuma untuk mendukungnya inikan Phonenya untuk mempercepat informasi saja kalau dukungannya harus lengkap dengan persyaratan administrasi. Ga bisa kita bekerja hanya telepon-telepon gitu saja. Dan itu harus kita benahi. Mengkomunikasikan pelaksanaan pembangunan di internal, kita memperbaiki system pelayanan, agar masyarakat tidak repot-repot lagi menunggu lama kalau mengurus sesuatu. Kalau di Desa, pelaksanaan pembangunannya kalau bentuk kegiatan pelaksanaannya kita turuni kelapangan seperti kesekolah-sekolah kita turun, kemasjid atau ketempat-tempat ibadah kita turun, pertemuan-pertemuan, ada juga untuk pembangunan ini ada perbaikan-perbaikan seperti perbaikan PKKnya, Dasa Wisma dibenahi, Ibu PKKnya. Selain itu juga masalah-masalah lain seperti meperbaiki atau memelihara bahu jalan. Itukan seharusnya urusan provinsi. Tapi kalau belum ada perbaikan dari provinsi maka Kecamatan akan menggerakannya untuk memperbaikinya, dan jangan lupa juga kita untuk berkoordinasi dengan perusahaan agar perusahaan ini ikut andil dalam pembangunan karena perusahaan ini adalah mitra kita untuk membangun karena tidak cukup dari pemerintahan saja yang bekerja” **(Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 February 2015).**

“Jadi kalau program saya kalian tanya itu yah, saya pertama kali memperbaiki internalnya. Membenahi kinerjanya baik fisik kantor maupun administrasinya ini harus dibenahi karena ini modal pondasinya kerja. Omong kosong jika saya turun kemasyarakat desa sedangkan disini saja amburadul, kita tutup rumah kita dulu baru turun kelapangan, nyelip kemasyarakat

silaturahmi, pas shalat magrib, shalat Zuhur, pas pertemuan masyarakat mengundang kita datang yah itulah tidak perlu pendekatan formal selagi kita bisa pendekatan informal. Ada mereka membuat musyawarah tahunan salah satunya Musrembangdes Bencah Kesuma kemaren saya datang kesana. Disekolah-sekolah begitu juga saya sudah ada jadwal untuk apel bersama, memberi ceramah dan lainnya. **(Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 Februari 2015).**

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *informan* penelitian maka diketahui komunikasi yang dilakukan oleh Camat dalam mengkomunikasikan setiap pembangunan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan sudah sesuai dasar administratif. Dalam internalnya beliau membenahi pelayanan administratif agar setiap masyarakat dapat dilayani dengan baik dan mudah mendapatkan informasi dari Kecamatan, serta turun kelapangan untuk bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Dan dengan melibatkan semua unsur dalam mengkomunikasikan pembangunan semua pihak akan mendapatkan kesempatan dalam menyampaikan informasi dan dapat menerima tujuan informasi dengan baik.

#### c) Pembagian Kerja

Pembagian Kerja merupakan langkah penting dalam melakukan koordinasi baik yang dilakukan Camat kepada perangkat- perangkat Kecamatan dan juga kepada organisasi yang ada di Kecamatan Kabun dalam kerja sama. Keserasian dalam kerja sama dapat dilihat seperti saling pengertian, tindakan yang selaras dan kekompakan dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah Kecamatan Kabun. Untuk mengetahui apakah setiap pegawai di Kecamatan

Kabun mengetahui tugasnya masing-masing dapat dilihat melalui kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya saya ini kalau pembagian tugasnya gampang-gampang saja. Saya menyuruh mereka bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka, itu ada diatur dalam Perbub Rokan Hulu No. 78 Tahun 2011 itu dasarnya. Disitu sudah ada jelas tugas masing-masing pejabat eselon, Kasubag-Kasubag, Kasi-kasi, Camat, Sekcam sudah ada tugas, dan saya tindak lanjuti menggunakan jabatan fungsional umum, jadi semua pegawai yang tidak ada jabatan kalau dulu dibidang Staf sekarang tidak ada staf, sekarang jabatan fungsional umum, jadi setiap jabatan ini ada tugas masing-masing ada fungsional umum pengasuh barang, fungsional umum administrasi, fungsional umum sekretaris pimpinan dan itu bukan saya karang-karang itu sudah mengacu pada Peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara. Setelah ada jabatan fungsional umum kita susun SKP-nya (Sasaran Kinerja Pegawai). SKP ini sebagai kontrak MoU dia dengan atasan mereka masing-masing dan itu wajib. Dan itu kan terus kita benahi, kita evaluasi terus pelaksanaan ini. **(Hasil Wawancara dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 February 2015).**

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur yang terdapat di Kecamatan Kabun bekerja sesuai dengan SKP yang telah di tentukan bagi Pegawai dan Jabatan Fungsional Umum, dan tidak adanya tumpang tindih dalam setiap pekerjaan.

“Iya, kita sudah punya tupoksi masing-masing. Dimana Camat kemarin sudah membagi-bagi, jadi sekarang tidak ada staf lagi sekarang sudah Fungsional Umum dia namanya, jadi kayak bang Alpen itu sudah ada tugasnya masing-masing biar tidak ada tumpang tindih

tugas. Bagian operator ada kerja operator, administrasi, administari yang dikerjakannya. (Hasil Wawancara dengan Kasi. Pemerintahan, Ibu Asnelly, S.E. 02 Februari 2015).

“Pembagian tugas setiap pegawai itu tertuang dalam SKP ( Sasaran Kerja Pegawai). Ini adalah kontrak kita untuk kerja seperti swasta, kita dikontrak dulu diawal tahun. Jadi semu pegawai sudah bekerja sesuai dengan SKP atau Tupoksi itulah.” (Hasil wawancara dengan Kasubag. Umum dan Perencanaan, Ibu Yurniaty, SP).

Dari hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa setiap aparatur yang ada di Kecamatan Kabun sudah melakukan tugasnya pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Pedoman dan Pedomannya itu berlandaskan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 78 Tahun 2011 yang mengatur tentang tugas dan fungsi setiap pegawai negeri sipil.

#### d) Pertemuan/Rapat

Pertemuan melalui rapat antara Kecamatan dengan pihak yang terkait dalam membahas dan memecahkan masalah dalam yang dihadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk pertimbangan bagi tim dalam menjalankan tugas. Rapat juga berguna agar antara pegawai tercipta hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorongnya koordinasi yang baik. Selain itu dengan adanya pertemuan rapat juga dapat mnegevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Koordinasi yang baik memerlukan rapat. Untuk melihat keefektifitasan rapat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Kalau di kecamatan rapat koordinasi itu setiap hari senin. Kalau musrembang itu sekali setahun.” (Hasil

wawancara dengan Kasi. PMD, Bapak H. Maksun, S.Sos. 02 Februari 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pertemuan rapat di Kecamatan Kabun tersusun dengan baik.

“Kalau di internal UPIKA-UIKA sudah ada masalah di UPTD, sama Kepala Desakan di undang kemaren masalah gini dirampung karena perkenalan disetiap desa, perkenalan masalah apa yang terjadi di desa-desa itu jadi dirampung dulu di tampung aspirasinya, seumpamanya di desa ini desa kabun apa masalahnya, di desa aliantan apapun masalahnya seperti itulah di desa-desa apa permasalahannya di UPTD-UPTD apa masalahnya, di kesehatan seumpannya, dipertanian, di pendidikan apa permasalahannya dirampung dia, jadi kalau ada rapat kembali kita lihat apa permasalahannya kita bicarakan baru kita cari solusinya, kalau bisa kita datangkan dari kabupaten kita datangkan. Rapat koordinasi sudah dilakukan sejak seminggu dia (Camat) disini dilakukan Rapat Koordinasi. (Hasil wawancara dengan Kasi. Pemerintahan, Ibu Asnelly, S.E. 02 Februari 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan untuk membahas segala permasalahan dalam pembangunan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan terstruktur serta melibatkan unsure-unsur yang terkait. Serta setiap aparatur yang diundang dalam rapat berhak menyampaikan setiap permasalahan yang ada di Desa mereka masing-masing.

“Jelas, kita sering mengadakan briefing dengan pegawai-pegawai. Kalau briefingnya lama saya tidak apel pagi saya ajak masuk aula lalu briefing. Tapi jika tidak ada yang kursial dan terlalu singkat, yah disitu saat apel pagi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Camat

**Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 Februari 2015).**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertemuan-pertemuan rapat yang dilaksanakan oleh Camat untuk berkoordinasi berjalan dengan baik. Dimana untuk rapat internalnya mereka melakukannya setiap pagi dan kemudian mengevaluasinya kembali pada sore harinya dan sesuai dengan kebutuhan Kecamatan.

## **2. 1. Faktor yang Menjadi pendukung Peran Camat sebagai Koordinator pembangunan Di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.**

### **A. Topografi Kecamatan Kabun**

Faktor yang sangat mendukung koordinasi Pembangunan di Kecamatan Kabun yaitu topografi Kecamatan yang strategis, hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan Kasi. PMD Kecamatan Kabun:

Factor apa saja yang menjadi pendukung koordinasi pembangunan di Kecamatan Kabun?

“...Topografi di Kecamatan Kabun itu tidak ada yang rawan bencana suasana yang kondusif itu juga mendukung...” **(Hasil wawancara dengan Kasi. PMD Kecamatan Kabun).**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi yang strategis sangat mempengaruhi dalam mejalankan sebuah koordinasi yang baik dan dalam merencanakan sebuah pembangunan lokasi nyaman dan kondusif yang menjadi factor penentu pembangunan di Kecamatan Kabun sehingga Camat sangat mudah untuk menjalankan peran kepemimpinannya.

### **B. Partisipasi**

Pelaksanaan Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat, pemerintah yang lain dan juga pihak ketiga. Hal ini membantu kelancaran koordinasi yang baik. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara denga Bapak Camat Kabun:

“...Faktor pendukungnya itu tadi pemerintah kita mendukung penuh untuk melaksanakan pembangunan, habis itu masyarakat kita harus peduli dan juga keterlibatan pihak ketiga, pihak swasta lumayan juga disini perusahaan-perusahaan...” **(Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 Februari 2015)**

Bersarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat juga menjadi factor penting bagi Camat untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Kabun, itu juga diberengi dengan koordinasi yang baik dengan pihak ketiga yaitu perusahaan-perusahaan swasta dalam membantu Camat menjalankan Perannya sebagai coordinator pembangunan di Kecamatan Kabun.

Pernyataan Bapak Camat diatas juga sejalan dengan pernyataan denga Kasi. PMD Kecamatan Kabun:

“...Kalau yang mendukung yang pertama itu partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan dari masyarakat agar tidak adanya komplain dari masayarak saat realisasinya...” **(Hasil wawanacara dengan Kasi. PMD Kecamatan Kabun, Bapak H. Masum, S.Sos. 02 Februari 2015).**

Dari kutipan hasil wawacara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peran Camat sebagai koordinator pembangunan sangat dibutuhkan yang namanya partisipasi oleh masyarakat setempat agar tidak

terhalangnya realisasi pembangunan di Kecamatan Kabun itu sendiri.

## **2. 2. Faktor yang menjadi penghambat Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan.**

### **A. Anggaran Dana**

Dana berasal dari APBD dan Swadaya masyarakat di Kecamatan Kabun merupakan sebagai penjamin berjalannya setiap program yang dilakukan oleh Camat dalam menjalankan Perannya sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sangat dibutuhkan. Anggaran yang tidak berkecukupan akan menjadi factor penghambat dalam proses koordinasi pembangunan. Hal ini dibuktikan melalui wawancara peneliti dengan Bapak Camat Kabun:

“Faktor penghambat, faktor penghambat yang didapati paling-paling anggaran terbatas untuk melakukan pembangunan itu cukup menghambat iya, sementara desa kita banyak, kebutuhan-kebutuhan kita banyak, objek kita banyak, habis itu memang sumber daya masyarakat kita yang terbatas”. (Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 Februari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa anggaran dana yang tidak sesuai dengan target pembangunan di Kecamatan Kabun sangat menghambat proses Koordinasi Pembangunan yang dilakukan oleh Camat Kabun. Kurangnya anggaran dan menjadi penghambat dalam proses pembangunan di Kecamatan Kabun juga di jelaskan oleh Kasi. PMD Kecamatan Kabun:

“Kalau hambatan itu pasti yang pertama urangnya anggaran dana, tidak semua usulan itu diakomodir yah kan makanya ada skala prioritas jadi kita

fokuskan pada yang prioritas. Seperti perbaikan jalan yang ada di Koto Ranah itukan banyak yang rusak. Itu bisa kita masukan ke dalam skala prioritas.” (Hasil wawancara dengan Kasi. PMD, Bapak H. Maksun, S.Sos. 02 Februari 2015).

Pernyataan diatas juga jelaskan oleh Kasi. Pemerintahan Kecamatan Kabun:

“Kalau untuk saat ini kayaknya, kalau untuk realisasi sebelumnya memang anggaran dana. Kalau dari desa belum ada pertentangan dari masyarakat tidak ada masalah. (Hasil wawancara dengan Kasi. Perencanaan, Ibu Asnelly, S.E. 02 Februari 2015).

Dari kutipan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan di Kecamatan Kabun belum berjalan efektif dikarenakan anggaran dana yang tidak mencukupi dalam proses penyelenggaraan Koordinasi pembangunan yang dilakukan oleh Camat. Tidak sesuainya anggaran yang ada, membuat banyaknya terbengkalainya program pemeliharaan fasilitas umum di Kecamatan Kabun.

### **B. Sarana dan Prasarana**

Penyelenggaraan dalam Peran Camat sebagai koordiantor pembangunan diperlukannya sarana dan prasaran yang memadai. Di Kecamatan Kabun saranan dan prasaran yang diperlukan dalam proses Koordinasi Pembangunan belum mencukupi, hal itu dijelaskan oleh Kasubag. Umum dan Perencanaan:

“Kalau yang pertama menghambat itu fasilitas atau sarana dan prasarana seperti Jaringan internet yang belum baik, juga peralatan kantor yang tidak memadai seperti tidak adanya komputer, adapun komputer dalam kondisi sudah rusak sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kabunpun belum bisa

dikatakan baik karena masih adanya pegawai yang tidak bisa menggunakan komputer bahkan juga dulu itu masih banyak yang tidak tahu tugasnya masing-masing. Sekarang saja yang sudah ada perubahan sedikit.” (**Hasil wawancara dengan Kasubag. Umum dan Perencanaan, Ibu Yurniaty, SP. 03 Februari 2015**).

Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan juga sumber daya manusia di Kecamatan Kabun yang belum dapat menyadari tugasnya masing-masing. Camat Kabun menjelaskan bahwa sarana dan prasarana juga tidak mendukung dalam koordinasi pembangunan di Kecamatan Kabun:

“Sarana dan prasarana masih terbatas, kalau sarana dan prasarana untuk pembangunan itu di kelola oleh kabupaten jadi Kecamatan tidak ada sarana dan prasarana untuk membangun. Disini Saja kita sifatnya itu koordinasi dan pembinaan dan mengajukannya ke kabupaten melalui Dinas Teknis. Kecamatan tidak ada urusannya untuk mengaspal jalan, namun kita hanya bisa mengusulkannya ke Kabupaten.” (**Hail wawancara dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Zul Hendri, S.Sos. 02 Februari 2015**).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Camat sebagai Koordinator Pembangunan belum berjalan dengan baik kepada pihak yang terkait dalam koordinasi pemeliharaan fasilitas umum. Sehingga banyak fasilitas umum yang dalam kondisi sangat buruk seperti jalan raya dan los pasar yang sudah tidak layak untuk digunak untuk sarana perekonomian.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada bab pembahasan dan hasil tentang Peran Camat Sebagai Koordiantor Pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kabun memang berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam realisasi perencanaan pembangunan di Kecamatan Kabun belum berjalan dengan baik masih banyaknya jalan-jalan yang rusak, dan pembangunan pasar yang belum masuk prioritas. Dengan unsur yang lain seperti komunikasi dalam koordinasi pembangunan terlaksana dengan baik, begitu juga kerja sama Kecamatan dengan pihak-pihak yang terkait berjalan baik dan tidak adanya pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta dalam pertemuan rapat dalam pemecahan masalah di Kecamatan Kabun berjalan sesuai dengan agenda Kecamatan.

2. Factor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Camat Sebagai Koordiantor Pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu seperti keterbatasan anggaran dana. Anggaran dana dalam pelaksanaan Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan menjadi terkendala terutama dalam pemeliharaan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Kabun. Saranan dan prasarana untuk melakukan koordinasi yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya masyarakat yang dibutuhkan Camat dalam pelaksanaan Peranya sebagai Koordinator Pembangunan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ardana, Komang dkk. 2009. *Perilaku Keorganisasian*, Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djarmiko, Yayat Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *System Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Handoko, T . Hani. 2003. *Manajemen*, Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, H. Melayu. 2006. *Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ivancevich, Konopaske, Matteson. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Edisi Ketujuh. Jil. 2. Alih Bahasa: Yuwono, Dharma. Jakarta: Erlangga
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis, 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Pratikto, 2002. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: PT Alumni.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Organisasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Safaria, Triantoro. 2004. *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stephen. P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*; alih bahasa Halida, Sartika, Dewi. Ed. 5. Jakarta: Erlangga
- Siagian P. Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik* Edisi Revisi. Jakarta: Raneka Cipta.
- Tadaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibowo. 2014. *Perilaku Dalam Organisasi*. Ed.-1-2. Jakarta: Rajawali Pers
- Yulk, Gary. 2005. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edisis Kelima; Alih Bahasa, Budi Suprianto; Editor, Eli Tanya. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

### **Karya Ilmiah**

- Jhunaidi. 2012. *Pelaksanaan Koordinasi Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Tinambunan, Harley. 2009. *Pelaksanaan Koordinasi dan Penyuluhan Narkoba Terhadap Masyarakat di Wilayah Kepolisian Ressorst Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitass Riau.